



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022  
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Negeri pada jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, maka kode wilayah tata kearsipan perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dengan adanya beberapa Perubahan pada Perangkat Daerah, maka perlu diubah;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 106);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 109);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Walikota ini.

q

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 11 Januari 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 11 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE  
WILAYAH TATA KEARSIPAN

PERUBAHAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

SEBELUM			DIUBAH MENJADI		
IV	Kelompok Dinas	410 . 100	IV	Kelompok Dinas	410 . 100
1	Dinas Pendidikan	410 . 101	1	Dinas Pendidikan	410 . 101
1	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 1	410 . 101 . 5 . 1	1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 2	410 . 101 . 5 . 2	2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 3	410 . 101 . 5 . 3	3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	410 . 101 . 5 . 4	4	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	410 . 101 . 5 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	410 . 101 . 5 . 5	5	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	410 . 101 . 5 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	410 . 101 . 5 . 6	6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	410 . 101 . 5 . 6

2

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE  
 WILAYAH TATA KEARSIPAN

PERUBAHAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

SEBELUM		DIUBAH MENJADI			
IV	Kelompok Dinas	410 . 100	IV	Kelompok Dinas	410 . 100
1	Dinas Pendidikan	410 . 101	1	Dinas Pendidikan	410 . 101
1	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 1	410 . 101 . 5 . 1	1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 2	410 . 101 . 5 . 2	2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan SDN Karang Sari 3	410 . 101 . 5 . 3	3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karang Sari	410 . 101 . 5 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	410 . 101 . 5 . 4	4	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	410 . 101 . 5 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	410 . 101 . 5 . 5	5	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	410 . 101 . 5 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	410 . 101 . 5 . 6	6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	410 . 101 . 5 . 6

SEBELUM					DIUBAH MENJADI				
7	UPT Satuan Pendidikan Pakunden 2	SDN 410	. 101	. 5 . 7	7	UPT Satuan Pendidikan Pakunden	SDN 2 410	. 101	. 5 . 7
8	UPT Satuan Pendidikan Tanjungsari 1	SDN 410	. 101	. 5 . 8	8	UPT Satuan Pendidikan Tanjungsari	SDN 1 410	. 101	. 5 . 8
9	UPT Satuan Pendidikan Tanjungsari 2	SDN 410	. 101	. 5 . 9	9	UPT Satuan Pendidikan Tanjungsari	SDN 2 410	. 101	. 5 . 9
10	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo 1	SDN 410	. 101	. 5 . 10	10	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo	SDN 1 410	. 101	. 5 . 10
11	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo 2	SDN 410	. 101	. 5 . 11	11	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo	SDN 2 410	. 101	. 5 . 11
12	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo 3	SDN 410	. 101	. 5 . 12	12	UPT Satuan Pendidikan Sukorejo	SDN 3 410	. 101	. 5 . 12
15	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenkidul 1	SDN 410	. 101	. 5 . 15	15	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenkidul	SDN 1 410	. 101	. 5 . 15
16	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenkidul 2	SDN 410	. 101	. 5 . 16	16	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenkidul	SDN 2 410	. 101	. 5 . 16
17	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor 1	SDN 410	. 101	. 5 . 17	17	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor	SDN 1 410	. 101	. 5 . 17
18	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor 2	SDN 410	. 101	. 5 . 18	18	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor	SDN 2 410	. 101	. 5 . 18
19	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor 3	SDN 410	. 101	. 5 . 19	19	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor	SDN 3 410	. 101	. 5 . 19

SEBELUM					DIUBAH MENJADI				
20	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 1	410	101	5 . 20	20	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman	410	101	5 . 20
21	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 2	410	101	5 . 21	21	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman	410	101	5 . 21
22	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 1	410	101	5 . 22	22	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	410	101	5 . 22
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 2	410	101	5 . 23	23	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	410	101	5 . 23
24	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 1	410	101	5 . 24	24	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung	410	101	5 . 24
25	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 2	410	101	5 . 25	25	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung	410	101	5 . 25
26	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 1	410	101	5 . 26	26	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo	410	101	5 . 26
27	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 2	410	101	5 . 27	27	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo	410	101	5 . 27
28	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 1	410	101	5 . 28	28	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul	410	101	5 . 28
29	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 2	410	101	5 . 29	29	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul	410	101	5 . 29
30	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 3	410	101	5 . 30	30	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul	410	101	5 . 30

0



SEBELUM					DIUBAH MENJADI				
31	UPT Satuan Pendidikan Sentul 4	SDN	410	. 101 . 5 . 31	31	UPT Satuan Pendidikan Sentul	SDN 4	410 . 101 . 5 . 31	
32	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan 1	SDN	410	. 101 . 5 . 32	32	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan	SDN 1	410 . 101 . 5 . 32	
33	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan 2	SDN	410	. 101 . 5 . 33	33	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan	SDN 2	410 . 101 . 5 . 33	
34	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan 3	SDN	410	. 101 . 5 . 34	34	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan	SDN 3	410 . 101 . 5 . 34	
35	UPT Satuan Pendidikan Bendogerit 1	SDN	410	. 101 . 5 . 35	35	UPT Satuan Pendidikan Bendogerit	SDN 1	410 . 101 . 5 . 35	
36	UPT Satuan Pendidikan Bendogerit 2	SDN	410	. 101 . 5 . 36	36	UPT Satuan Pendidikan Bendogerit	SDN 2	410 . 101 . 5 . 36	
37	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah 1	SDN	410	. 101 . 5 . 37	37	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah	SDN 1	410 . 101 . 5 . 37	
38	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah 2	SDN	410	. 101 . 5 . 38	38	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah	SDN 2	410 . 101 . 5 . 38	
39	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah 3	SDN	410	. 101 . 5 . 39	39	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah	SDN 3	410 . 101 . 5 . 39	
40	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah 4	SDN	410	. 101 . 5 . 40	40	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah	SDN 4	410 . 101 . 5 . 40	
41	UPT Satuan Pendidikan Plosokerep 1	SDN	410	. 101 . 5 . 41	41	UPT Satuan Pendidikan Plosokerep	SDN 1	410 . 101 . 5 . 41	

2

SEBELUM					DIUBAH MENJADI				
42	UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 2	410	. 101	. 5 . 42	42	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep	410	. 101 . 5 . 42	
43	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 1	410	. 101 . 5 . 43		43	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog	410 . 101 . 5 . 43		
44	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 2	410	. 101 . 5 . 44		44	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog	410 . 101 . 5 . 44		
45	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 3	410	. 101 . 5 . 45		45	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog	410 . 101 . 5 . 45		
47	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 1	410	. 101 . 5 . 47		47	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang	410 . 101 . 5 . 47		
48	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 2	410	. 101 . 5 . 48		48	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang	410 . 101 . 5 . 48		
1	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kecamatan Kepanjenkidul	410	. 101 . 7 . 1		1	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kecamatan Kepanjenkidul	410 . 101 . 7 . 1		
2	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Blitar	410	. 101 . 7 . 2		2	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kota Blitar	410 . 101 . 7 . 2		
3	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tlumpu	410	. 101 . 7 . 3		3	UPT Satuan Pendidikan TKN Tlumpu	410 . 101 . 7 . 3		
4	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Blitar	410	. 101 . 7 . 4		4	UPT Satuan Pendidikan TKN Blitar	410 . 101 . 7 . 4		

SEBELUM					DIUBAH MENJADI				
5	UPT Satuan Pendidikan Negeri Kepanjenlor	TK	410	. 101 . 7 . 5	5	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenlor	TKN	410	. 101 . 7 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan Negeri Ngadirejo 1	TK	410	. 101 . 7 . 6	6	UPT Satuan Pendidikan Ngadirejo	TKN	410	. 101 . 7 . 6
7	UPT Satuan Pendidikan Negeri Klampok	TK	410	. 101 . 7 . 7	7	UPT Satuan Pendidikan Klampok	TKN	410	. 101 . 7 . 7
8	UPT Satuan Pendidikan Negeri Rembang	TK	410	. 101 . 7 . 8	8	UPT Satuan Pendidikan Rembang	TKN	410	. 101 . 7 . 8
9	UPT Satuan Pendidikan Negeri Pakunden	TK	410	. 101 . 7 . 9	9	UPT Satuan Pendidikan Pakunden	TKN	410	. 101 . 7 . 9
10	UPT Satuan Pendidikan Negeri Tanggung 1	TK	410	. 101 . 7 . 10	10	UPT Satuan Pendidikan Tanggung	TKN	410	. 101 . 7 . 10
11	UPT Satuan Pendidikan Negeri Karangtengah	TK	410	. 101 . 7 . 11	11	UPT Satuan Pendidikan Karangtengah	TKN	410	. 101 . 7 . 11
12	UPT Satuan Pendidikan Negeri Bendogerit 1	TK	410	. 101 . 7 . 12	12	UPT Satuan Pendidikan Bendogerit	TKN	410	. 101 . 7 . 12
13	TK Negeri Karang Sari 1		410	. 101 . 7 . 13	13	UPT Satuan Pendidikan Karang Sari	TKN	410	. 101 . 7 . 13
14	TK Negeri Kepanjenkidul 1		410	. 101 . 7 . 14	14	UPT Satuan Pendidikan Kepanjenkidul	TKN	410	. 101 . 7 . 14
15	TK Negeri Sananwetan 1		410	. 101 . 7 . 15	15	UPT Satuan Pendidikan Sananwetan	TKN 1	410	. 101 . 7 . 15

SEBELUM				DIUBAH MENJADI			
16	TK Negeri Sananwetan 2	410	. 101 . 7 . 16	16	UPT Satuan Pendidikan TKN 2 Sananwetan	410	. 101 . 7 . 16
17	TK Negeri Turi 1	410	. 101 . 7 . 17	17	UPT Satuan Pendidikan TKN Turi	410	. 101 . 7 . 17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410	. 103	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410	. 103
	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	410	. 103 . 2		Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	410	. 103 . 2
	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)	410	. 103 . 3		Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	410	. 103 . 3
	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	410	. 103 . 4		Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)	410	. 103 . 4
					Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	410	. 103 . 5
8	Dinas Lingkungan Hidup	410	. 108	8	Dinas Lingkungan Hidup	410	. 108
	Sekretariat	410	. 108 . 1		Sekretariat	410	. 108 . 1
	Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	410	. 108 . 2		Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	410	. 108 . 2
	Bidang Persampahan	410	. 108 . 3		Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limba B3	410	. 108 . 3

0



SEBELUM				DIUBAH MENJADI			
Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan				Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
V	Kelompok Badan	410	. 200	V	Kelompok Badan	410	. 200
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Sekretariat				Sekretariat			
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur				Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur			
Bidang Penelitian dan Pengembangan				Bidang Riset dan Inovasi Daerah			
410 . 201 . 4				410 . 201 . 4			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 C08